

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Persoalan tindak kekerasan seakan tak ada habisnya. Tindak kekerasan bisa ditemukan di seluruh negara, baik pada negara yang masih berkembang atau pada negara yang sudah maju. Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan perhatian khusus kepada pentingnya penanganan kekerasan sebagai prioritas kesehatan masyarakat. Adanya aturan *lockdown* dan pembatasan sosial berdampak besar pada meningkatnya laporan KDRT yang diterima oleh polisi dan penyedia layanan terkait (WHO, 2021). PBB (1993) pada *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* mendefinisikan kekerasan pada perempuan sebagai perilaku yang didasarkan pada perbedaan gender yang berakibat penderitaan pada perempuan baik fisik, seksual, psikologis, atau ancaman atas terjadinya perbuatan kekerasan tersebut.

Rumah merupakan tempat yang paling berbahaya bagi perempuan (UNODC, 2019). Fakta ini memang bertentangan dengan persepsi bahwa rumah merupakan tempat yang aman. Namun, pada kenyataannya rumah dapat menjadi masalah yang serius bagi sebagian perempuan (Abirafeh, 2019). Berdasarkan keterangan dari UNODC tahun 2018, diketahui bahwa sebagian besar pelaku kasus pembunuhan wanita di dunia ialah pasangan atau keluarganya sendiri. Pada tahun 2017 ada sekitar 87.000 perempuan yang terbunuh dan 58% diantaranya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarganya (UNODC, 2018). Hasil penelitian tersebut

dapat diartikan bahwa setiap harinya ada sebanyak 137 wanita di dunia yang terbunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Persoalan kekerasan tertinggi berasal dari kawasan Asia, yaitu sebesar 20.000 masalah dan diikuti oleh Afrika sebanyak 19.000 masalah.

Hasil penelitian UNODC didukung pula dengan temuan WHO (2021) yang menunjukkan bahwa sekitar 1 (satu) dari 3 (tiga) atau hampir 30% dari semua wanita yang berada dalam suatu hubungan pernah mendapatkan perilaku kekerasan baik fisik atau seksual oleh pasangannya. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu tanpa memandang gender. Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kejahatan seksual atau *gender based violence*. *Gender based violence* dapat dimaknai sebagai kekerasan dalam keluarga atau sering disebut sebagai *domestic violence*. Namun tidak dapat disangkal bahwa kekerasan juga dapat dialami oleh pria. Hal ini mengacu pada hasil survei wawancara dan pemeriksaan kesehatan untuk orang dewasa di Jerman yang menemukan bahwa sebanyak 1,2% wanita dan 0,9% pria yang berpartisipasi dalam survei telah menjadi korban kekerasan fisik oleh pasangannya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Kolbe & Büttner, 2020).

Kekerasan tidak hanya dialami oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan juga oleh anak-anak. Setiap tahunnya angka kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan penambahan dan sulit untuk dikendalikan. Mirisnya, angka pasti banyaknya kekerasan terhadap anak sulit untuk didapatkan data konkritnya sebab masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan peristiwa kekerasan pada anak

yang terjadi pada ranah rumah tangga. Sebagian masyarakat di Indonesia memiliki pandangan bahwa kekerasan yang terjadi pada ranah rumah tangga ialah persoalan internal keluarga sehingga tidak perlu adanya campur tangan orang luar termasuk aparat penegak hukum.

Tabel 1. 1 Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus Nasional
2019	20.294
2020	21.506
2021	23.877
2022	25.246

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id (2023)

Indonesia sebagai negara yang masih pada tahap berkembang juga tidak lepas dari adanya tindak kekerasan. Data Kementerian PPPA (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 20.294 kasus kekerasan. Pada tahun 2020 kasus yang terjadi naik menjadi 21.506. Pada tahun 2021 naik lagi menjadi 23.877 kasus. Puncaknya, pada tahun 2022 mencapai 25.246. Data dari KemenPPPA (2023) menyatakan bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan di Indonesia.

Tabel 1. 2 Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Korban Kekerasan		2.411	2.407	2.355	2.110	2.257
Laki-laki	Anak	441	408	400	332	307
	Dewasa	101	116	99	104	83
Perempuan	Anak	949	866	825	865	922
	Dewasa	920	1.017	1.031	809	945

Sumber: DP3AKB Jawa Tengah (2021)

Berdasarkan data korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah yang penulis peroleh dari DP3AKB dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai 2020 terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan banyaknya tindak kekerasan di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2017 tercatat ada sebanyak 2.411 kasus kemudian turun menjadi 2.407 kasus pada tahun berikutnya yaitu 2018. Pada tahun 2019 kasus kekerasan di Provinsi Jawa Tengah menurun lagi menjadi 2.355 dan pada tahun 2020 masih mengalami penurunan hingga 2.110 kasus. Namun, pada tahun 2021 kasus kekerasan di Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga mencapai 2.257 kasus. Dari data DP3AKB juga menunjukkan bahwa korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh perempuan dan pada korban laki-laki didominasi oleh anak-anak.

Gambar 1. 1 Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah 2021



Sumber: DP3AKB Jawa Tengah (2022)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Kota Semarang mengalami kasus kekerasan di antara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Laporan dari DP3AKB Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 163 kasus kekerasan di Kota Semarang yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Semarang dengan jumlah 147 kasus kemudian Kabupaten Batang sebanyak 130 kasus kekerasan. Dengan melihat kasus kekerasan di Kota Semarang yang menunjukkan angka fluktuatif maka patut untuk mendapatkan perhatian yang lebih.

Tabel 1. 3 Kekerasan di Kota Semarang Berdasarkan Jenisnya

Tahun	Jenis Kekerasan					Jumlah
	KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP	
2019	49	139	9	4	22	223
2020	40	108	5	1	10	165
2021	31	95	4	5	22	159
2022	75	115	3	12	23	228

Sumber: DP3A Kota Semarang (2023)

Data terbaru dari DP3A Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi 223 kasus kekerasan, tahun 2020 turun sebesar 26% menjadi 165 dan di tahun 2021 turun sebesar 3,63% menjadi 159 kasus. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus yang drastis, yaitu sebesar 43,39% menjadi 228 masalah. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan masalah kekerasan di Kota Semarang.

Data pada Tabel 1.3 juga menunjukkan bahwa bila dilihat dari jenisnya maka terdapat 31 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di tahun 2021 yang kemudian naik menjadi 75 kasus di tahun 2022. Kenaikan jumlah kasus juga terjadi pada kekerasan berjenis KDRT, yaitu sebanyak 95 kasus di tahun 2021 kemudian meningkat menjadi 115 kasus di tahun 2022. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan masalah kekerasan khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak di Kota Semarang dengan didominasi oleh kasus KTA dan KDRT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KDRT sudah menjadi fenomena sosial yang banyak ditemui pada semua lapisan masyarakat. Bukan hanya perempuan saja yang umumnya menjadi korban dalam KDRT melainkan juga anak-anak. Anak-anak yang secara fisik mengalami kekerasan akan mengakibatkan berbagai dampak serta trauma psikologis. Berada di tengah-tengah kondisi keluarga yang di dalamnya kerap terjadi kekerasan dapat mempengaruhi psikologis anak. Dampak kekerasan terhadap anak, apapun tujuannya tidak bisa dianggap remeh sama sekali sebab memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi anak. Anak akan mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya ialah anak menjadi tidak ingin melanjutkan hidupnya (Fajrianti et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pencegahan guna meminimalisir masalah kekerasan yang terjadi.

Perlindungan bagi perempuan dan anak menjadi agenda yang wajib dilaksanakan guna memastikan kontinuitas kehidupan masyarakat yang simultan serta simpatik terhadap gender. Salah satu usaha perlindungan adalah dengan mencegah kekerasan pada perempuan dan anak. Melalui Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menunjukkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam usaha pencegahan kekerasan yang dialami pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Pada Perda ini dijelaskan bahwa pencegahan merupakan ikhtiar nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat guna mencegah terjadinya perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai usaha guna mengentaskan masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Dilansir dari Tribunnews.com (2022), Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu menjelaskan bahwa pemerintah telah menggandeng Kementerian PPPA guna mewujudkan Kota Semarang *zero* kekerasan anak dan perempuan, yaitu dengan membentuk UPTD PPA. Tak hanya itu, pemerintah juga telah berupaya dengan melakukan edukasi ke tiap sekolah dan edukasi kepada keluarga di setiap kelurahan guna mewujudkan *zero* kekerasan perempuan dan anak.

Gambar 1. 2 Kasus Kekerasan di Kota Semarang



Sumber: Antaranews.com (2022)



### Gambar 1. 3 Kasus KDRT di Kota Semarang

#### Pemeriksaan Anak Oleh Ayah Kandung di Semarang, Menteri PPPA Desak Penegakan Hukum Tegas

Megawati - Rabu, 23 Maret 2022 | 14:20 WIB



Sumber: Tempo.co (2022)

Upaya meminimalisir kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kota Semarang telah dilaksanakan, namun pada realitanya masih banyak berita yang menunjukkan terjadinya kekerasan di Kota Semarang. Media Antaranews (2022) melaporkan terjadinya tindak KDRT yang dilakukan pria berumur 26 tahun yang mengakibatkan kematian istrinya berusia 23 tahun. Tidak hanya KDRT, dilansir dari media Tempo (2022) telah terjadi kasus kematian anak umur 8 tahun di Kecamatan Genuk akibat perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Atas terjadinya kasus kekerasan ini Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menghimbau DP3A untuk melakukan evaluasi serta optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Tabel 1. 4 JPPA Terbentuk di Kota Semarang Tahun 2022

No	Kelurahan Terbentuk	No	Kelurahan Terbentuk	No	Kelurahan Terbentuk
1.	Lempongsari	37.	Plamongansari	73	Purwosari
2.	Karangrejo	38.	Tlogosari Kulon	74	Panggung Lor
3.	Bendan Duwur	39	Tlogomulyo	75	Bendan Ngisor
4.	Sampangan	40	Muktiharjo Kidul	76	Petompon
5.	Gajah Mungkur	41	Kalicari	77	Jatingaleh
6.	Jomblang	42	Sadeng	78	Tegalsari
7.	Karanganyar Gunung	43	Gunungpati	79	Kedungpane
8.	Wonotinggal	44	Sumurejo	80	Tembalang
9.	Jatisari	45	Plalangan	81	Sendangmulyo
10.	Cangkiran	46	Pakintelan	82	Mangunharjo
11.	Mijen	47	Ngijo	83	Tandang
12.	Wonopolo	48	Kalisegoro	84	Randusari
13.	Meteseh	49	Sukorejo	85	Pleburan
14.	Sendangguwo	50	Tambakaji	86	Lamper Lor
15.	Sambiroto	51	Podorejo	87	Mugasari
16.	Lamper Tengah	52	Wates	88	Terboyo Wetan
17.	Peterongan	53	Jerakah	89	Jabungan
18.	Bangetayu Kulon	54	Tugurejo	90	Sronдол Wetan
19.	Gebangsari	55	Mangunharjo	91	Penggaron Kidul
20.	Kudu	56	Karangayu	92	Pedurungan Lor
21.	Trimulyo	57	Kembangarum	93	Pedurungan Kidul
22.	Muktiharjo Lor	58	Manyaran	94	Mangunsari
23.	Bangetayu Wetan	59	Pekunden	95	Nongkosawit
24.	Genuksari	60	Pendrikan Lor	96	Pongangan
25.	Banjardowo	61	Gabahan	97	Kalipancur
26.	Karangroto	62	Kemijen	98	Wonosari
27.	Gayamsari	63	Rejosari	99	Purwoyoso
28.	Kaligawe	64	Sarirejo	100	Karanganyar
29.	Tambakrejo	65	Mlatibaru	101	Mangkang Kulon
30.	Pandean Lamper	66	Mlatiharjo	102	Grisikdono
31.	Siwalan	67	Plombokan	103	Krobokan
32.	Tinjomoyo	68	Dadapsari	104	Bongsari
33.	Ngesrep	69	Bandarharjo	105	Pendrikan Kidul
34.	Pudakpayung	70	Panggung Kidul	106	Pandansari
35.	Tlogosari Wetan	71	Tanjung Mas	107	Bungangan
36.	Gemah	72	Kuningan		

Sumber: DP3A Kota Semarang (2023)

DP3A telah membentuk konsep perlindungan anak dan perempuan berbasis masyarakat dengan nama Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak atau JPPA

pada level kelurahan. Pada Pasal 1 Ayat 19 Perwal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang menjelaskan bahwa JPPA merupakan layanan yang dibentuk bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terdiri dari layanan pengaduan, pendidikan, layanan pemantauan dengan memanfaatkan sumber daya manusia di masing-masing kelurahan. Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa sampai bulan Desember tahun 2022 sudah terbentuk 107 JPPA dari 177 kelurahan di Semarang sehingga masih terdapat 70 kelurahan yang belum memiliki JPPA di wilayahnya.

Pelaksanaan pencegahan kekerasan oleh DP3A tentunya membutuhkan kerjasama banyak pihak dengan tugasnya sendiri-sendiri. Serangkaian tahapan yang melibatkan banyak aktor di dalamnya membutuhkan sistematisasi khusus agar setiap bagian dapat saling terkait serta menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebagaimana mestinya. DP3A memiliki tujuan untuk menciptakan perempuan dan anak yang terlindungi. Tujuan organisasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan organisasi dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen (Prihatini & Dewi, 2021). Oleh karena itu, penting bagi DP3A untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Siswanto (2005) menjelaskan bahwa manajemen merupakan disiplin dan seni dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan. Adanya manajemen yang dikelola dengan baik akan mempermudah sebuah organisasi, pegawai, dan masyarakat untuk mewujudkan tujuannya (Hasibuan, 2011). George Terry dalam karyanya yang berjudul *Principles of Management* (2006) menjelaskan

bahwa fungsi manajemen mencakup 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Pasal 32 Perwal No. 33 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang memaparkan bahwa Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertugas mempersiapkan kegiatan perancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Elista (2021) mengenai Peranan Stakeholder dalam Program Pencegahan Kekerasan di Rumah Tangga di Kota Semarang menunjukkan bahwa pada DP3A belum memiliki SOP terkait pencegahan kekerasan. Permasalahan ini selaras dengan hasil wawancara pra-observasi yang dilakukan dilaksanakan di DP3A Kota Semarang yang membuktikan bahwa hingga saat ini (2023) masih belum terbentuk SOP terkait upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kasus menjelaskan bahwa hingga saat ini SOP yang terbentuk hanya untuk bidang penanganan kekerasan saja. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam fungsi manajemen yang berkaitan dengan fungsi perencanaan (*planning*).

Keberadaan SOP dapat menunjukkan kesungguhan pemerintah yang diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar dapat berjalan dengan pasti. SOP berperan penting dalam menghindari berbagai macam penyimpangan yang mungkin terjadi atau bila terjadi maka dapat mempermudah

dalam menemukan sumber permasalahannya untuk kemudian dapat diselesaikan dengan cara yang paling tepat. Apabila tahapan-tahapan dilaksanakan selaras dengan rancangan yang telah diputuskan pada SOP maka cepat atau lambat kualitas dari pelayanan publik yang diberikan akan lebih profesional, cepat, dan mudah (Kilis, 2016).

Peneitian Mahartiwi (2018) mengenai implementasi Perda No.5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menunjukkan bahwa dalam usaha melindungi perempuan dan anak di Kota Semarang masih terjadi *overlapping* dalam pembagian tugas. Hasil penelitian Mahartiwi tidak sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang menjelaskan bahwa Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan memiliki tugas untuk membagi tugas kepada bawahan. Hasil penelitian Mahartiwi mengindikasikan kurang optimalnya fungsi manajemen pada DP3A khususnya pada fungsi penggerakan (*actuating*).

Tabel 1. 5 Rumusan Masalah pada Renstra DP3A Tahun 2021-2026

No	Permasalahan
1	Pemberdayaan, pencegahan kekerasan serta perlindungan terhadap perempuan masih minim
2	Pemenuhan Hak dan layanan untuk perlindungan khusus Anak di Kota Semarang belum maksimal
3	Fungsi lembaga sosial masyarakat belum maksimal

Sumber: Renstra DP3A tahun 2021-2026

Pada Renstra DP3A tahun 2021-2026 telah dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah DP3A, yaitu “Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak belum maksimal” serta “Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat yang belum maksimal” yang kemudian dijabarkan dalam permasalahan seperti pada Tabel 1.6. Permasalahan yang terjadi antara lain pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data yang masih minim, Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang belum maksimal, dan fungsi lembaga sosial masyarakat belum maksimal.

Berdasarkan yang telah penulis paparkan ditemukan beberapa permasalahan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang yaitu masih tingginya tingkat kekerasan di Kota Semarang; belum terbentuknya SOP terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang (Elista, 2021); terjadinya *overlapping* pembagian tugas dalam upaya perlindungan perempuan dan anak (Mahartiwi, 2018); pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan belum maksimal; serta Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang yang belum maksimal.

Adanya permasalahan yang tercantum dalam Renstra DP3A Tahun 2021-2026 serta hasil penelitian Mahartiwi (2018) dan Elista (2021) mengindikasikan terjadinya *mismanagement* dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A. Pertanyaan penelitian yang diambil ialah “Mengapa tingkat

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang masih tinggi?” Peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimana manajemen yang dilakukan oleh DP3A sehingga belum berhasil dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang sehingga judul yang peneliti angkat ialah “*Mismanagement* dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

- a. Peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang.
- b. Belum terbentuknya SOP terkait pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang.
- c. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang belum mencakup seluruh kelurahan di Kota Semarang.
- d. Adanya *overlapping* pembagian tugas dalam usaha perlindungan perempuan dan anak.
- e. Pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dinilai masih kurang.
- f. Pelaksanaan pemenuhan hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang dinilai belum maksimal.

### **1.3. Perumusan Masalah**

- 1) Bagaimana manajemen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang?
- 2) Apa saja penghambat dalam manajemen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

- 1) Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan manajemen dalam upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang.
- 2) Mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Tidak hanya memiliki tujuan, penelitian mengenai manajemen pencegahan tindak kekerasan di Kota Semarang juga memiliki kegunaan penelitian yang di antaranya meliputi:

#### **1.5.1. Kegunaan bagi Peneliti**

- a. Setelah mendapatkan berbagai materi kuliah secara teoritis maka melalui penelitian ini menjadi wadah bagi peneliti untuk



mempraktikkan serta mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan tersebut.

- b. Melalui penelitian ini pula harapannya dapat menambah pengetahuan mengenai manajemen dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang.

#### 1.5.2. Manfaat bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai manajemen dalam usaha mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Semarang.

#### 1.5.3. Manfaat bagi Instansi

Penelitian ini bisa menjadi masukan serta ide yang bisa digunakan oleh instansi DP3A untuk mengambil keputusan guna memaksimalkan upaya manajemen pencegahan kekerasan perempuan dan anak.

### **1.6. Kerangka Teori**

#### 1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara peneliti menemukan perbandingan dan pandangan baru untuk penelitian masa depan. Penelitian ini juga membantu peneliti dalam menemukan penelitian dan menunjukkan keunikan penelitian. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan :

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Metode	Teori	Hasil
1.	Ajeng Resi Krisdyawati, Tri Yuniningsih (2019)  Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang	Deskriptif kualitatif	Rich L. Daft (1992) memaparkan empat bentuk pendekatan efektivitas yaitu:  - Sasaran - Sumber - Proses - Gabungan  Steers (1985:9) menyebutkan ada empat faktor yang berperan besar dalam efektivitas organisasi, meliputi:  1. Karakteristik Organisasi  2. Karakteristik Lingkungan  3. Karakteristik Pekerja  4. Kebijakan dan Praktik Manajemen	Penindakan kasus kekerasan pada anak di Kota Semarang telah efektif, namun belum optimal. Hal ini disebabkan masih ditemukannya korban tindak kekerasan di Kota Semarang.
2.	Mei Sarah Wati dan Kismartini (2019)  Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang	Kualitatif	Pengkategorisasian <i>stakeholders</i> berdasarkan Ardianto (2008: 124) terbagi dua jenis yaitu:  A. <i>Stakeholders</i> internal. B. <i>Stakeholders</i> eksternal.  <i>Stakeholders</i> menurut pendapat (Yosevita, 2015); (Benn, Abratt, & O'Leary, 2018); (Kismartini & Yusuf,	<i>Stakeholders</i> internal : DP3A sebagai fasilitator, impelentator, dan koordinator. <i>Stakeholders</i> eksternal : LSM/NGO, Masyarakat Peduli Perempuan, Dinas terkait, Rumah Sakit, Akademisi, Pihak Keamanan dan Pengadilan berperan sebagai fasilitator. Faktor penghambat ialah rendahnya komitmen dari anggota yang tergabung dalam PPT, terbatasnya SDM dan dana, <i>overlapping</i> tugas dan fungsi lembaga, tata birokrasi yang

			2015); Rahmawati & Mussadun, 2017)  A. <i>Stakeholder</i> utama B. <i>Stakeholder</i> pendukung C. <i>Stakeholder</i> kunci	berbelit, serta budaya patriarki di masyarakat.
3.	Amanda Elista (2021)  Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang	Deskriptif kualitatif	Identifikasi <i>stakeholder</i> menurut Nugroho meliputi:  a. <i>Stakeholder</i> pemerintah b. <i>Stakeholder</i> NGO (Lembaga Masyarakat) c. <i>Stakeholder</i> swasta  Peran <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan menurut Nugroho (2014), meliputi :  a. <i>Policy creator</i> b. <i>Implementator</i> c. <i>Fasilitator</i> d. <i>Coordinator</i> e. <i>Akselerator</i>	Tugas <i>stakeholder</i> sudah dijalankan dengan cukup baik meskipun belum optimal. Masalah yang muncul ialah tingginya jumlah persoalan KDRT di Kota Semarang, minimnya tanggung jawab masyarakat dan DP3A untuk melakukan pencegahan tindak KDRT, terbatasnya dana untuk mengadakan sosialisasi di tingkatan RT/RW. Hasil identifikasi <i>stakeholder</i> , meliputi: a) <i>stakeholder</i> pemerintah berperan selaku <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator & implementor. b) <i>stakeholder</i> lembaga masyarakat sebagai fasilitator & implementor. c) <i>stakeholder</i> swasta berperan menjadi akselerator dalam usaha mencegah KDRT yang terjadi di Kota Semarang.
4.	Bernice Roberts Kennedy (2017)  <i>Global Perspective on Violence of Women and Children: Advocacy on</i>	Deskriptif	Kennedy (2015) menjelaskan model teori mengenai kekerasan yang dialami pada perempuan dan anak tingkat global meliputi:  a. Faktor struktural: struktur politik dan kebijakan; wilayah geografis; serta	Ketidaksetaraan gender, norma sosial seputar maskulinitas, dan ketidaksetaraan ekonomi telah berdampak pada kekerasan perempuan dan anak di masyarakat kita. Kurangnya kesetaraan dan pemberdayaan secara sosial, budaya, dan politik membuat perempuan tidak dapat mengatasi

	<i>Preventing 21st Century Slavery</i>		<p>layanan kesehatan dan kemanusiaan</p> <p>b. Faktor sosio-demografis meliputi: demografi, faktor sosial ekonomi dan faktor budaya.</p>	<p>penaklukan terhadap kekerasan. Di seluruh dunia, perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak dasar untuk perlindungan dan dari pelecehan; terutama hingga kekerasan pasangan intim. Kekerasan struktural dalam masyarakat kita mengakibatkan penderitaan dan kematian sesering kekerasan langsung. Namun, efek kekerasan struktur lebih halus, lebih lambat dan kompleks dalam menemukan solusi. Seperti disebutkan, jika kekerasan struktural tidak diselesaikan dari waktu ke waktu, itu menghasilkan kekerasan langsung karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial dari kelompok yang tertindas seperti perempuan dan anak-anak.</p>
5.	<p>Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostyaningsih (2019)</p> <p>Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>Indikator evaluasi kebijakan :</p> <p>a. Kelembagaan</p> <p>b. Pembiayaan</p> <p>c. Pelaksanaan perlindungan</p> <p>d. Kerjasama kemitraan dan</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan</p>	<p>Kebijakan perlindungan anak dari perilaku kekerasan di Kota Semarang telah terlaksana dengan baik meskipun belum bisa dikatakan maksimal sebab terjadi beberapa hambatan seperti minimnya SDM, minimnya dana, kurangnya keterlibatan masyarakat label buruk dari masyarakat, terkendalanya akses sekolah bagi para korban kekerasan, dan pengawasan yang belum dilaksanakan secara periodik.</p>
6.	Erna Puji Lestari (2022)	Deskriptif Kualitatif	<p>Komponen evaluasi kebijakan berdasarkan William Dunn (2003) :</p>	<p>Pencegahan kekerasan di Kota Semarang belum maksimal terbukti dari</p>

	<p>Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang</p>		<p>a. Efektivitas  b. Efisiensi  c. Kecukupan  d. Pemerataan  e. Responsivitas  f. Ketepatan</p>	<p>masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan pelajaran melalui sosialisasi, layanan perlindungan hukum sudah terbentuk meskipun pada pelaksanaannya membutuhkan waktu yang tidak singkat dan tidak semua anak korban kekerasan mendapatkan keadilan hukum, layanan khusus penanganan fisik pada lembaga kesehatan telah terbentuk namun terhambat oleh proses reintegrasi, koordinasi yang terbentuk antar lembaga telah terlaksana dengan baik. Hambatan dalam pelaksanaannya seperti minimnya SDM, lemahnya budaya penegakan hukum, dan label buruk masyarakat kepada korban kekerasan.</p>
--	---	--	--	--

### 1.6.2. Administrasi Publik

Dewi (2011) menjelaskan bahwa administrasi di negara Indonesia ialah hasil adopsi dari administrasi yang dijalankan di Belanda. Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *administrare* yang artinya adalah melayani dan membantu. Istilah administrasi dalam bahasa Belanda disebut dengan *administration* yang terbentuk dari kata *ad* yang memiliki makna intensif dan kata *ministrare* bermakna melayani. Administrasi bila diartikan menggunakan bahasa Inggris memiliki makna melayani dengan baik.

Administrasi publik berperan penting dalam suatu pemerintahan sebab pada ilmu ini terdapat proses koordinasi yang dijalankan oleh sekumpulan manusia guna menjalankan tugas-tugas pemerintahan sebagai upaya mencukupi kebutuhan publik agar efektif dan efisien. Penjelasan ini sesuai dengan opini yang dipaparkan David H. Rosenbloom (dalam Pasolong, 2012) berbunyi administrasi publik menunjukkan penggunaan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum guna mencukupi kemauan pemerintah pada bidang legislatif, eksekutif, sebagai upaya menjalankan fungsi-fungsi peraturan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat secara maupun sebagian.

Nicholas Henry (dalam Sjamsuddin, 2007) berpendapat administrasi publik ialah kombinasi erat antara konsep dan praktik yang bertujuan menambah pemahaman pemerintah kaitannya dengan masyarakat yang diperintah serta mendukung responsivitas kebijakan publik terhadap

kepentingan sosial. Administrasi publik berupaya melembagakan praktik-praktik manajemen agar selaras dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik”

Dalam buku Syafiie (2011) John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus menjelaskan mengenai administrasi publik, yaitu:

- a) Melingkupi implementasi dari kebijakan pemerintah yang sudah disahkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b) Koordinasi upaya-upaya perorangan dan kelompok dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah yang utamanya mengenai pekerjaan rutin pemerintah.
- c) Proses yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah, pengarahan keahlian, dan metode-metode yang jumlahnya tidak sedikit, serta memberikan arah dan maksud terhadap usaha sekelompok orang.

Administrasi Publik berperan penting karena di dalamnya terdapat proses kerjasama sekelompok orang guna melaksanakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi hal-hal yang diperlukan publik dengan efisien dan efektif (Pasolong, 2013). Sondang P. Siagian (dalam Syafiie, 2011) mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan suatu keputusan yang telah dipetik untuk kemudian dijalankan oleh dua orang atau lebih guna meraih tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Felix A. Ngro dan Lyoyd G Nigro (dalam Syafiie, 2011) mengemukakan bahwa :

1. Administrasi Publik merupakan kerja sama sebuah kelompok pada lingkup pemerintahan.
2. Administrasi Publik mencakup tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pertalian diantaranya.
3. Administrasi Publik memiliki peran penting dalam perencanaan kebijakan pemerintah karena merupakan potongan proses publik.
4. Administrasi Publik berkaitan erat dengan berbagai jenis gugusan swasta serta perorangan dalam upaya pemberian pelayanan bagi masyarakat.
5. Administrasi Publik dalam beberapa bagian berbeda pengertian dengan administrasi perseorangan.

Administrasi publik merupakan keseluruhan tahapan yang dikerjakan oleh suatu organisasi maupun perorangan yang berkenaan dengan perwujudan hukum serta peraturan yang menjadi *output* badan legislatif, badan eksekutif dan pengadilan (George J. Gordon dalam Syafiie, 2011). Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) menjelaskan bahwa konsep Administrasi Publik merupakan suatu proses dimana sumberdaya dalam organisasi publik diatur untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengelola (*manage*) putusan-putusan dalam kebijakan publik. Keban (2014) menyebutkan bahwa istilah Administrasi Publik adalah bagaimana pemerintah berperan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kuasa atau selaku regulator yang giat dan selalu berinovasi pada saat mengatur atau mengambil langkah dan



inisiatif yang menurutnya krusial atau baik untuk publik sebab publik dinaggap sebagai elemen yang pasif, kurang piawai, harus tunduk, dan menerima apapun yang diatur oleh pemerintah.

#### 1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Dalam keberjalanannya, ilmu administrasi publik tak lepas dari adanya pergeseran paradigma. G. Shabbir Cheema (dalam Keban, 2014) menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) kali pergeseran paradigma administrasi publik yang meliputi:

- A. *Traditional Public Administration*, di mana paradigma ini memfokuskan diri pada hierarki, keberlanjutan, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-retional, otoritas, serta profesionalitas.
- B. *Public management*, di mana berpedoman pada penerapan pokok-pokok manajemen termasuk yang berkaitan dengan efisiensi dalam menggunakan sumber daya, efektivitas, orientasi pada masyarakat, dan lain-lain.
- C. *New Public Management (NPM)*, di mana mengarahkan administrasi publik pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan orientasi hasil yang berbasis kinerja.
- D. *Governance*, yang merupakan sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola dari hubungan masyarakat, pemerintah, dan golongan swasta. Paradigma

*governance* memudahkan mekanisme dan proses di mana masyarakat dapat memmanifestasikan kepentingannya.

Selain itu, Henry (dalam Keban, 2014) juga menyebutkan bahwa administrasi publik mengalami 6 (enam) kali pergeseran paradigma, yakni:

1) Paradigma 1 (1900-1926)

Paradigma pertama atau yang biasa diketahui sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma pertama mengemukakan adanya pemisah antara konsep politik dan konsep administrasi. Godnow dan Leonard D. White mengungkapkan bahwa pusat perhatian politik ialah kepada kebijakan atau keinginan masyarakat, sedangkan administrasi berfokus pada implementasi dari kebijakan atau keinginan masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemisahan, yakni badan *legislative* yang memiliki tugas mengekspresikan kehendak rakyat, sedangkan badan eksekutif melaksanakan kehendak rakyat dan selanjutnya badan yudikatif memiliki tugas untuk membantu badan legislatif yang kaitannya dengan penentuan tujuan dan perumusan kebijakan.

2) Paradigma 2 (1927-1937)

Paradigma kedua yang dikenal sebagai paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Paradigma ketiga berfokus pada administrasi publik dan lokusnya belum dapat dipastikan kejelasannya sebab dianggap bahwa

prinsip – prinsip tersebut bisa berlaku pada semua struktur termasuk organisasi pemerintahan. Pada paradigma kedua, pengaruh manajemen klasik sangat besar. Tokoh – tokoh paradigma ini ialah Willoughby, Gullick dan Urwick yang dipengaruhi oleh figur manajemen klasik seperti F.W Taylor. Tokoh – tokoh tersebut memperkenalkan prinsip POSDCORB, meliputi: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting and Budgeting*

### 3) Paradigma 3 (1950-1970)

Paradigma ketiga dikenal sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Paradigma ketiga ini berkontradiksi dengan pendapat tentang *value free administration* pada satu pihak dan pendapat *value-laden politics* di sisi lainnya. Kritik tersebut dikemukakan oleh Hebert Simon yang lantas membangkitkan perdebatan dikotomi administrasi dan politik. Setelah itu, muncul gagasan dari Morstein Mark mengenai pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu hal yang tidak realistis dan tidak mungkin. Pada pelaksanaannya, lahir kembali paradigma baru di mana administrasi publik sebagai disiplin politik dengan lokusnya berupa birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi samar.

### 4) Paradigma 4 (1956-1970)

Paradigma keempat yang dikenal dengan administrasi publik sebagai Ilmu Administrasi dengan berpegang pada fungsi manajemen yang

diuraikan secara ilmiah serta mendalam. Fokus paradigma ini ialah perilaku organisasi, analisis manajemen, riset operasi, dan lainnya dengan lokusnya tidak jelas sebab semua fokus dianggap dapat diimplementasikan pada golongan swasta maupun publik.

5) Paradigma 5 (1970-1990)

Paradigma kelima yang dikenal dengan administrasi publik sebagai administrasi publik dimana fokus dan lokusnya sudah jelas. Manajemen, teori organisasi, dan kebijakan publik menjadi fokus dalam paradigma kelima. Lokus paradigma kelima ialah masalah-masalah kepentingan publik.

6) Paradigma 6 (1990-sekarang)

Paradigma administrasi publik yang dikenal saat ini ialah paradigma *governance*. Paradigma ini muncul di akhir tahun 1990-an, Tamagoya (dalam Ikeanyibe et al., 2017) menjelaskan bahwa *governance* merupakan pelaksanaan kekuasaan atau otoritas yang dilakukan oleh pimpinan politik guna mencapai kesejahteraan rakyatnya, pelaksanaannya melalui proses yang rumit karena beberapa kelompok masyarakat memiliki kewenangan dan menyuarakan kebijakan publik di mana hal ini dapat berdampak pada manusia dan institusi.

Penelitian Manajemen Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh DP3A Kota Semarang sesuai dengan paradigma kelima administrasi publik. yaitu administrasi publik sebagai Administrasi

publik karena fokus penelitian ini berkaitan dengan manajemen dalam pencegahan kekerasan guna mencapai kepentingan publik.

#### 1.6.4. Manajemen

Manajemen bermula dari kata *manus* yang memiliki makna tangan dan *agere* yang bermakna melakukan, apabila digabung menjadi kata *manage* dalam bahasa Inggris yang memiliki makna mengelola atau dalam bahasa Latin disebut *managiere* yang diartikan sebagai melatih. Robbins dan Coulter (dalam Wibowo, 2013) menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses penyelesaian kegiatan oleh orang lain dengan cara yang efektif dan efisien. Efisiensi ialah keterkaitan *input* dan *output* untuk mendapatkan ongkos sumber daya yang minimum. Berbeda dengan efisiensi, efektif berkaitan dengan upaya mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Stoner dan Freeman (dalam Wibowo, 2013) mendefinisikan manajemen sebagai suatu upaya penggunaan seluruh sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui tahapan *planning, organizing, leading, dan controlling*.

Selaras dengan pendapat Stoner, George Terry (dalam Hariani, 2017) menjelaskan bahwa manajemen ialah usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada dan dijalankan dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi manajemen yang dipaparkan Stoner dan Terry

berfokus pada tahapan dari kegiatan-kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) lebih lanjut memaparkan bahwa fungsi manajemen yang utama ialah:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pengarahan (*actuating*)
4. Pengawasan (*controlling*)

Persamaan dari masing-masing pencapat ahli terlihat dari unsur-unsur manajemen yang disampaikan oleh para ahli dengan unsur manajemen yang disampaikan George R. Terry (2011). Perbedaan tercermin dari penyebutan komponen manajemen yang berbeda seperti personalia, pengarahannya, pengoordinasian, dan pelaporan yang termasuk dalam kegiatan dari fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan.

George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) mengungkapkan fungsi manajemen mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi manajemen ini biasanya juga dilafalkan sebagai POAC.

1. Perencanaan (*planning*)

*Planning*, adalah suatu proses yang melibatkan pemilihan dan menghubungkan informasi, serta membuat dan menggunakan hipotesis tentang masa depan dengan menggambarkan dan

merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebuah organisasi perlu lebih dulu menentukan suatu hal yang ingin dicapai untuk kemudian direpresentasikan dalam bentuk rumusan tujuan yang jelas (Rohman, 2017).

Wijayanti (2008) dalam paparannya menjelaskan perencanaan adalah bagian dari fungsi manajemen yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada penentuan visi (misi), tujuan, dan metode yang akan digunakan. Selain itu, perencanaan juga mencakup pengaturan kebijakan yang akan diterapkan, proyek, program, prosedur, sistem, alokasi anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan Wijayanti sejalan dengan yang dikemukakan Koontz dan O'donnel (1993) bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuantujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dan alternatif-alternatif yang ada.

## 2. Pengorganisasian (*Organization*)

Menurut definisi George R. Terry yang dikutip (dalam Sukarna, 2011) "organizing" adalah proses yang melibatkan pengambilan keputusan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai jenis aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini

mencakup penempatan pegawai pada aktivitas-aktivitas ini, menyediakan lingkungan fisik yang sesuai untuk pelaksanaan pekerjaan, dan menetapkan hubungan wewenang di antara individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan berbagai aktivitas yang diinginkan. Menurut Koontz (dalam Prihatini & Dewi, 2021) proses pengorganisasian melibatkan serangkaian aktivitas berikut:

- a. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Melakukan departementalisasi atau pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu.
- c. Melakukan pendelegasian wewenang (*Delegation of Authority*) untuk memberikan tanggung jawab dan keputusan kepada individu atau kelompok yang sesuai.
- d. Melakukan Koordinasi (*Coordination*) wewenang untuk memberikan tanggung jawab dan keputusan kepada individu atau kelompok yang sesuai. G. R. Terry (dalam Prihatini & Dewi, 2021) mendefinisikan koordinasi sebagai usaha yang teratur dan terpadu untuk memastikan bahwa jumlah dan waktu yang tepat disediakan, serta untuk mengarahkan pelaksanaan guna



mencapai tindakan yang seragam dan harmonis sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

### 3. Pengarahan (*actuating*)

Segala hal yang telah direncanakan dan diorganisasikan mustahil bisa berlangsung dengan optimal bila tidak dilaksanakan. Fungsi pengarahannya lebih berfokus pada cara mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Tujuan pokok dari fungsi pengarahannya ialah bagaimana cara menumbuhkan motivasi pegawai agar berkeinginan untuk bekerja dengan ikhlas tanpa merasa terpaksa. Pada praktiknya, perlu pengarahannya sebagai usaha yang berhubungan dengan segala aspeknya agar seluruh anggota organisasi dapat bekerja secara bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan. *Actuating* berdasarkan pendapat George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) ialah upaya mendorong dan membangun keinginan seluruh anggota agar mau berusaha dengan intens dan ikhlas untuk mewujudkan tujuan yang sejalan dengan perencanaan serta usaha-usaha perorganisasian dari pihak pemimpin.

Orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengarahannya ialah pemimpin. Kepemimpinan didefinisikan oleh G. R. Terry (dalam Sukarna, 2011) sebagai kepiawaian seseorang dalam rangka mengarahkan anggotanya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta rajin mengerjakan kewajiban-kewajiban yang

diamanatkan oleh pimpinan. Lewin (dalam Robbins & Coulter, 2002) membagi tiga tipe gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan kendali bebas.

- a. Gaya kepemimpinan autokratis, yaitu terjadi apabila pimpinan secara penuh menentukan atau mengambil keputusan dan kebijakan dari dirinya sendiri.
- b. Gaya kepemimpinan demokratis atau biasa dikenal sebagai gaya kepemimpinan partisipatif terjadi apabila seorang pemimpin memberikan otoritas secara luas adil. Gaya kepemimpinan ini mengharuskan seorang pemimpin untuk melibatkan anggotanya sebagai tim dalam upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Pemimpin secara terbuka memberikan informasi terkait tugas, pekerjaan dan tanggung jawab anggotanya.
- c. Gaya kepemimpinan kendali bebas terjadi apabila anggota berperan besar dalam upaya penetapan tujuan dan penyelesaian masalah sedangkan pemimpin tidak banyak terlibat.

Pemberian pengarahan tidak bisa dilepaskan dari proses berkomunikasi dengan anggota organisasi. Komunikasi dibutuhkan untuk memperjelas proses pengarahan melalui komunikasi pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan dengan efektif. Komunikasi menjadi salah satu aspek yang paling krusial dalam

memastikan keberhasilan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Prihatini & Dewi, 2021).

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

*Controlling* didefinisikan oleh George R. Terry (dalam Sukarna, 2011) sebagai proses menentukan apa saja yang harus dimanifestasikan, yakni syarat minimum apa yang sedang dilaksanakan, pelaksanaan dengan menilai pelaksanaan, dan apabila diperlukan maka bisa dilakukan perubahan-perubahan, serta pada akhirnya pelaksanaan dapat sejalan dengan rencana atau sesuai dengan ukuran. Melalui pengawasan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan. Faktor yang mempengaruhi proses manajemen

Athoillah (2010) mengelompokkan 3 (tiga) bentuk pengawasan manajemen yaitu pengawasan yang bersifat *top down*, *bottom up*, dan *self control*.

- a. Pengawasan bersifat *top down* terjadi dimana pengawasan dikerjakan oleh seorang pemimpin langsung kepada pegawainya. Pengawasan *top down* banyak digunakan dalam menjalankan roda keorganisasian. Selain memiliki kemampuan konseptual, melalui pengawasan tipe ini menuntut seorang pemimpin untuk memiliki kemampuan teknis juga.

- b. Bersifat *bottom up* dimana pengawasan dilakukan oleh anggota terhadap atasannya. Tipe pengawasan ini tidak secara formal digunakan, namun semestinya tipe ini juga dapat diterapkan dalam praktik lapangan. Tidak hanya pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota atas rencana yang telah ditetapkan, melainkan anggota juga harus bisa mengawasi atasan dalam pelaksanaan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tipe *bottom up* lantas dapat mengurangi terjadinya tindakan penyimpangan dan kesewenang-wenangan dari pimpinan.
- c. Bersifat *self controll* di mana pemimpin dan anggota sama-sama berperan aktif untuk mengawasi diri sendiri. Pengawasan kendali bebas berfokus pada kesadaran diri, introspeksi diri, dan menjadi panutan untuk orang lain yang dalam hal ini ialah anggota.

Wijayanti (2008) mengungkapkan bahwa pengawasan dalam manajemen terdiri dari empat tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Penentuan standar.
- b. Pengukuran penampilan (*performance*), yang meliputi aktivitas-aktivitas berikut:

- a) Observasi dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota organisasi
  - b) Wawancara
  - c) Mengulas laporan tertulis mengenai hasil yang telah dicapai.
- c. Menganalisis, menyampaikan opini, serta mengevaluasi *pelaksanaan*, dibandingkan dengan standar.
- d. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Salah satu aspek yang mempengaruhi penerapan sistem manajemen ialah sifat dari pemimpin serta keadaan organisasinya. Malayu S. P. Hasibuan (dalam Badrudin, 2015) menyebutkan terdapat 4 (empat) sistem manajemen yang diimplementasikan dalam organisasi yakni manajemen bapak, manajemen tertutup, manajemen terbuka, dan manajemen demokrasi.

1. Manajemen Bapak (*paternalistic management*) terjadi di mana setiap usaha dan aktivitas anggota selalu mengikuti jejak pemimpin. Pemimpin sudah mendapatkan kharisma dari bawahan sehingga anggota merasa bahwa pemimpinnya paling baik, pandai, dan benar.
2. Manajemen Tertutup (*closed management*) terjadi di mana pemimpin tidak memberitahu secara terbuka keadaan suatu organisasi kepada anggotanya sehingga keputusan yang diambil tidak melibatkan partisipasi dari anggota.

3. Manajemen terbuka (*open management*) merupakan kebalikan dari manajemen terbuka di mana pemimpin tidak jarang memberitahukan keadaan organisasi kepada anggota dengan begitu anggota dapat mengetahui pasti keadaan organisasi. Pemimpin dalam mengambil keputusan untuk organisasi selalu melibatkan pendapat dari anggota tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemimpin.
4. Manajemen demokratis (*democratic management*) tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan manajemen terbuka terlebih pada tahap pengambilan keputusan di mana anggota dilibatkan partisipasinya dalam memberi saran, masukan, pemikiran serta cara memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pengambilan keputusan pada manajemen demokratis ditetapkan berdasarkan keputusan bersama, berbeda dengan manajemen terbuka di mana pengambilan keputusan tidak melibatkan anggota atau hanya ditetapkan oleh pemimpin saja.

Manajemen dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Namun apabila tujuan belum bisa tercapai maka menunjukkan terjadinya *mismanagement*. *Mismanagement* merupakan suatu kesalahan/kekeliruan tindakan pada saat proses pencapaian tujuan yang sedang berlangsung (Firdaus, 2018). Soekarno (1986) memaparkan beberapa penyebab timbulnya manajemen, yakni belum adanya pola

struktur organisasi yang seragam, belum adanya keseragaman bahasa atau saling pengertian dalam manajemen, belum adanya manajemen *mindedness* di antara pejabat manajer, belum adanya kesatuan cara dan tata kerja antara instansi yang satu dengan yang lain, tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan, kurang tepatnya koordinasi, tidak sesuai rencana dengan kesanggupan ataupun kemampuan pelaksanaan rencana, adanya perbedaan pendapat antara manajer dan pegawai pelaksana, manajer merasa lebih penting, dan adanya birokratisme.

Keberhasilan organisasi dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan melalui beberapa unsur yang membentuk kegiatan manajemen. George R. Terry (dalam Rohman, 2017) menyebutkan beberapa unsur dalam manajemen yang sering disebut dengan 6M, yaitu:

1. *Man*

Manusia berperan penting dalam sebuah organisasi sebab manusialah yang melaksanakan fungsi manajemen. Manusia memiliki gagasan dan keinginan yang fungsinya untuk menentukan unsur lain. Tercukupinya jumlah manusia dengan didukung mutu yang memadai akan berdampak pada kelancaran proses manajemen.

2. *Money*

Uang digolongkan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan meraih tujuan. Dalam proses manajemen banyak sedikitnya unsur

uang akan memberikan pengaruh yang besar dalam proses pencapaian tujuannya.

3. *Methods*

Metode digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan guna meraih tujuan yang sudah ditentukan. Pemilihan metode atau langkah-langkah dalam suatu kegiatan yang baik akan membantu tercapainya proses manajemen.

4. *Material*

Material digunakan dalam berbagai macam kegiatan manajemen guna mendukung pencapaian tujuan.

5. *Machines*

Mesin merupakan alat yang digunakan untuk menunjang serta memberi kemudahan bagi manusia untuk menjalankan berbagai kegiatan manajemen guna mencapai tujuan. Keberadaan mesin guna mencapai suatu tujuan organisasi sangatlah penting sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata.

6. *Market*

Pasar merupakan unsur lanjutan dalam proses manajemen. Melalui pasar dapat diketahui kekurangan maupun keuntungan dari adanya produk. Dengan begitu maka dapat diputuskan apakah perlu dilakukan peningkatan mutu strategi atau hanya mempertahankan yang ada.



#### 1.6.5. Manajemen Publik

Ilmu administrasi publik mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Secara khas, administrasi publik dibagi menjadi dua bagian yaitu kebijakan publik dan manajemen publik walaupun menurut Ott, Hyda, dan Shafritz (dalam Keban, 2014) manajemen publik dan kebijakan publik disebut sebagai dua disiplin ilmu administrasi publik yang saling bertindihan. Sebutan kebijakan publik dan manajemen publik diumpamakan sebagai organ yang ada pada tubuh manusia. Kebijakan publik diumpamakan menjadi otak dan syaraf yang membuat kebijakan, sedangkan manajemen publik diibaratkan sebagai jantung dan sirkulasinya selaku pihak yang menjalankan kebijakan.

Manajemen publik sesuai dengan paradigma kelima dalam administrasi publik, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik dengan lokus dan fokus yang sudah jelas. Manajemen publik adalah upaya mengelola tahap pelaksanaan organisasi publik yang biasa merujuk dalam perbaikan pelayanan publik yang disediakan dari pemerintah untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen dan paradigma kelima saling berkaitan di mana suatu organisasi pemerintahan mengelola dan memperbaiki proses pelayanan publik guna memenuhi kepentingan masyarakat.

Dimensi manajemen berkaitan dengan cara menggunakan prinsip-prinsip manajemen guna menerapkan mengimplementasikan kebijakan publik. Selanjutnya, Shafritz & E.W. (1997) mengatakan

bahwa manajemen publik dimaknai sebagai usaha seseorang untuk meraih tujuan organisasi dengan cara menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi melalui pemanfaatan sumber daya baik manusia maupun mesin. Pengertian ini bukan hanya menunjukkan tahap pencapaian tujuan namun pula sekelompok individu yang memiliki tanggung jawab guna melakukan proses itu.

Shafritz, dkk (1991) memahami bahwa manajemen publik namun bukanlah *scientific management*, terlepas dari kenyataan bahwa manajemen publik sangat dipengaruhi olehnya. Manajemen publik juga bukanlah *policy analysis*, bukan pula "administrasi publik baru" ataupun rencana yang lebih baru. Bagaimanapun juga, manajemen publik mengatasi tekanan antara orientasi *rational-instrumental* di satu perspektif dan arah politik di sisi lain. Manajemen publik merupakan sebuah studi interdisipliner melalui komponen pokok organisasi, serta kombinasi antar fungsi manajemen pada satu sisi, dengan sumber daya manusia, informasi, fisik, keuangan serta politik pada sisi lainnya.

Shafritz, dkk (1991) memaparkan ilmu manajemen publik serta kebijakan publik adalah 2 (dua) disiplin ilmu publik yang tumpang tindih tetapi guna membedakannya maka dapat dipaparkan bahwa *public policy* merepresentasikan sistem jantung serta sirkulasi pada tubuh seseorang. Dengan maksud lain, manajemen publik adalah tahap menjalankan SDM serta non manusia selaras "perintah" kebijakan publik.

Woodrow Wilson seorang penulis buku yang berjudul "*The Study of Administration*" pada tahun 1887 (dalam Shafritz & Russel, 1997) adalah pioner manajemen publik. Pada aliran ini yang dibahas betul-betul manajemen publik. Pada tulisannya, Wilson memaksa supaya disiplin administrasi publik segera memusatkan fokusnya dalam orientasi yang diemban oleh dunia bisnis, memperbaiki mutu pegawai pada badan pemerintah, aspek organisasi serta cara-cara pemerintahan. Fokus melalui ajakan itu, yaitu melaksanakan perbaikan fungsi eksekutif pada badan pemerintahan sebab waktu tersebut dianggap sudah melebihi batas kenormalan yang merupakan akibat dari banyaknya kasus korupsi, kolusi, serta nepotisme, dengan menggunakan prinsip *manajemen business*.

Shafritz, dkk (1991) memiliki pendapat bahwa di tahun 1990an, manajemen publik mengalami masa peralihan dengan sejumlah isu penting yang perlu dihadapi, yakni :

- 1) Privatisasi merupakan sebuah alternatif untuk pemerintah dalam rangka menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat
- 2) Akuntabilitas serta rasionalitas
- 3) Kontrol serta perencanaan
- 4) Penganggaran serta keuangan, serta
- 5) Produktivitas SDM

#### 1.6.6. Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Kekerasan dicirikan sebagai perilaku yang melanggar hukum terlepas dari penggunaan maksud-maksud yang menyerang secara nyata dan lisan serta melukai hidup, tubuh atau berpotensi menimbulkan hilangnya kebebasan seseorang. *United Nations* menerjemahkan kekerasan pada wanita dapat didefinisikan sebagai setiap perilaku didasarkan atas bedanya jenis kelamin sehingga menimbulkan akibat kesulitan dan penderitaan wanita baik fisik, seksual, dan psikologis. Selain itu, terdapat ancaman serta kebebasan yang dibatasi secara tidak adil baik publik maupun privat (UNODC, 2018). *Pan American Health Organization* (2014) memaparkan bahwa kekerasan perempuan mungkin terjadi dalam beberapa bentuk seperti kekerasan fisik, seksual, emosional oleh pasangan intim, pemerkosaan dan pemaksaan seksual oleh pelaku, perdagangan orang, dan bentuk-bentuk spesifik budaya seperti pembuahan demi kehormatan, *female genital mutilation*, dan pernikahan dini dan paksa. Kekerasan oleh pasangan menjadi bentuk kekerasan yang paling mendominasi kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Kekerasan pada anak adalah mencakup segala wujud kekerasan yang dilakukan kepada orang berusia di bawah 18 tahun, baik kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, teman sebaya, pasangan, atau orang asing (WHO, 2022). Kekerasan pada anak mencakup segala bentuk kekerasan fisik, seksual, dan emosional, penelantaran, perlakuan lalai, dan

eksploitasi. Penganiayaan anak lebih detail mengacu pada kekerasan yang pelakunya ialah orang dewasa dengan adanya unsur tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Dahlberg LL, 2002). Kekerasan yang dialami di masa kanak-kanak sangat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan anak selama masa hidupnya termasuk juga berdampak pada kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan negara. Kekerasan pada anak mengakibatkan kematian, luka parah, perkembangan otak dan syaraf yang terganggu, terganggunya perkembangan kognitif, rendahnya prestasi dalam pendidikan, kesehatan yang buruk, kehamilan, potensi penyakit menular, dan kesulitan mendapat pekerjaan (WHO, 2022).

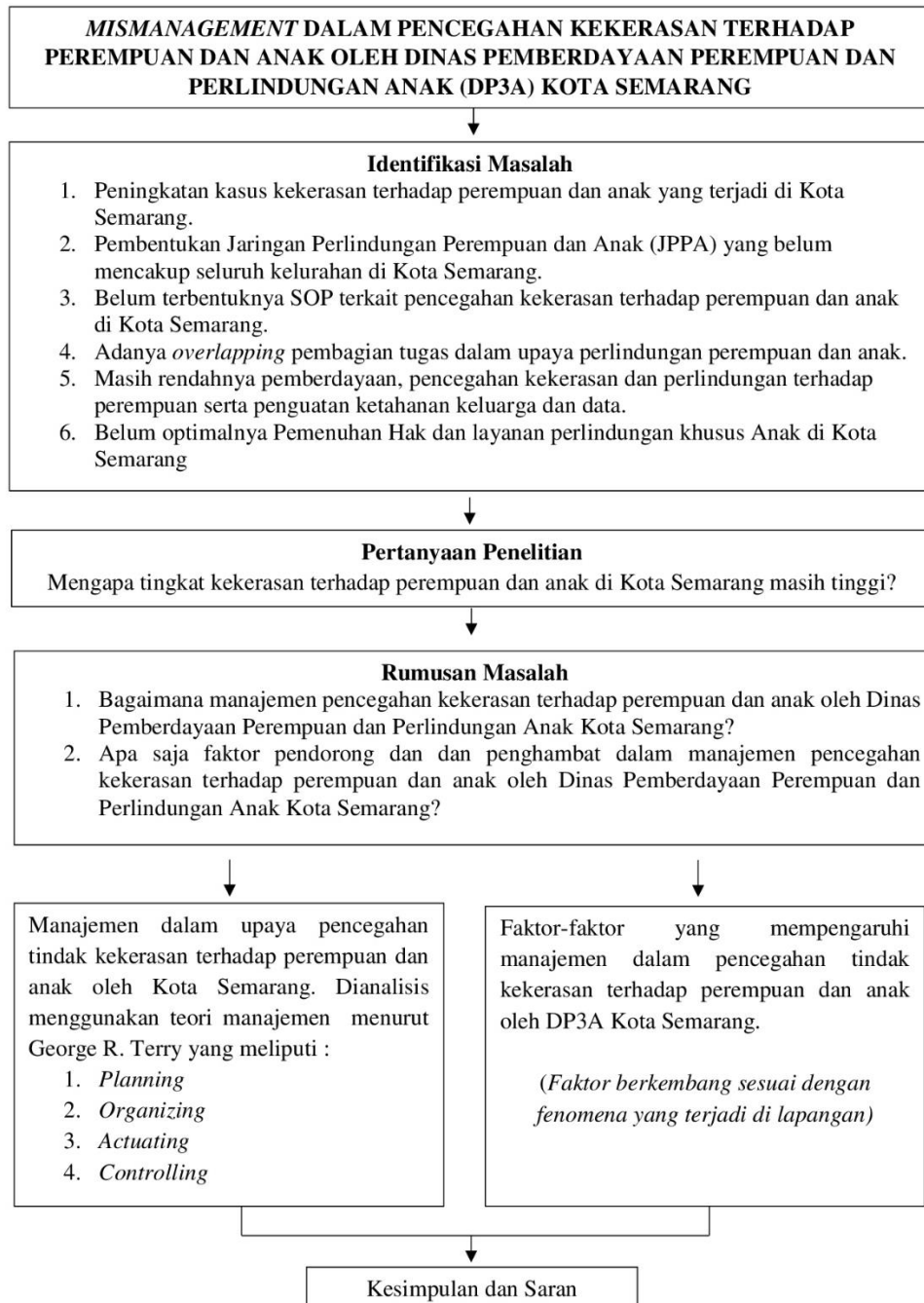
#### 1.6.7. Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang serius dengan kerugian di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun kekerasan merupakan ancaman yang mungkin terjadi pada semua orang namun perempuan dan anak-anak merupakan subjek yang paling rentan menjadi korban sebab dianggap belum memiliki sarana perlindungan yang layak (*National Academy of Sciences*, 2011). Perda Semarang No. 5 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pencegahan, yaitu usaha langsung yang dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat guna mencegah perilaku kekerasan terhadap wanita maupun anak.

Upaya mengakhiri atau secara signifikan mengurangi kekerasan dengan eksplisit tercantum dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Target SDGs poin 5.2 ialah penghapusan segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak perempuan; target poin 16.1 ialah secara signifikan mengurangi segala wujud jenis kekerasan dan angka kematian yang terjadi, dan target 16.2 yakni mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan semua wujud kekerasan pada anak. Dampak negatif kekerasan sangat besar bagi buruknya kesehatan dan sosial masyarakat sehingga melalui pelaksanaan pencegahan kekerasan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan guna mencapai target SDGs lainnya termasuk target kesehatan, gender, pekerjaan, dan keselamatan.

## 1.7. Kerangka Pikir

Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan Peneliti (2023)

## 1.8. Fenomena Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah manajemen yang dijalankan oleh DP3A dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Guna melihat manajemen yang dijalankan tersebut maka peneliti menggunakan dasar pemikiran fungsi manajemen menurut George R. Terry. Pemilihan teori didasarkan pada fenomena yang akan diteliti, yakni berkaitan manajemen pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang.

### 1. Manajemen pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang

Pada penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen yang disampaikan oleh George R. Terry (dalam Hasibuan, 2011) dengan mempertimbangkan keempat fungsi berikut:

#### a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu perumusan tujuan yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada sehingga ke depannya tujuan biasa sejalan dengan yang diharapkan melalui sumber daya yang ada agar tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan menjadi landasan utama dalam kelangsungan sebuah organisasi. Sebuah organisasi dapat menjalankan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan apabila sebelumnya telah dibentuk rencana-rencana yang



nantinya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Pada proses perencanaan ini seorang pemimpin perlu bijaksana dan cermat dalam memutuskan mengenai apa, kapan, dan bagaimana harus melakukan sesuatu sehingga nantinya rencana tersebut dapat diaplikasikan dengan optimal. Berkaitan dengan permasalahan penulis maka sebelum dilakukan upaya pencegahan kekerasan terlebih dahulu dilihat perencanaannya.

Perencanaan dilakukan oleh pihak DP3A meliputi:

- d) Penentuan tujuan yang akan dicapai
- e) Perumusan rencana yang akan dikerjakan
- f) Penentuan runtutan serta penetapan waktu secara rinci bagi rencana yang telah dirumuskan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan tahapan pengaturan kerja sama sumber daya-sumber daya yang dimiliki meliputi keuangan, fisik/aset lainnya, dan manusia dalam organisasi tersebut yang semata-mata untuk mencapai efektivitas dan daya guna paling tinggi. Dalam hal ini, pengorganisasian pada upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang penting untuk dilakukan agar kekerasan yang terjadi di Kota Semarang dapat dihapuskan. Proses pengorganisasian meliputi:

- a) Struktur organisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.
- b) Pembagian pekerjaan dalam upaya pencegahan kekerasan.
- c) Koordinasi yang dijalankan dalam rangka penyelenggaraan pencegahan kekerasan.

c. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan bertalian erat dengan tahap perencanaan di mana perencanaan menentukan penggabungan yang dianggap paling baik dari segala faktor, kekuatan, dan sumber daya yang dibutuhkan agar nantinya dapat memberi arahan dan memotivasi karyawan. Bila dikaitkan dengan permasalahan pencegahan kekerasan maka fungsi pengarahan akan sangat menentukan keberhasilan DP3A dalam mencegah kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kota Semarang. Fungsi pengarahan mencakup:

- a) Komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam upaya pencegahan kekerasan.
- b) Pemberian pembinaan pada penyelenggara dalam upaya pencegahan kekerasan.
- c) Kepemimpinan dalam upaya pencegahan kekerasan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi pengawasan perlu dilakukan guna melihat apakah rencana yang telah disusun realistis dan dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila rencana tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka sebab-sebab yang tidak dapat diharapkan akan terjadi. Oleh karena itu pengawasan juga menjadi alat mengevaluasi sebuah perencanaan yang telah disusun. Berkaitan dengan permasalahan penulis maka fungsi pengawasan tidak boleh luput dari para penyelenggara pencegahan kekerasan agar pelaksanaan pencegahan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Fungsi pengawasan meliputi:

- a) Standar pelaksanaan pencegahan kekerasan
- b) Pengukuran pelaksanaan pencegahan kekerasan
- c) Pengambilan tindakan koreksi guna mengatasi masalah dalam upaya pencegahan kekerasan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi manajemen pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang

Proses identifikasi faktor yang berpengaruh dalam mendorong ataupun menghambat upaya pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang akan ditelusuri berdasarkan temuan-temuan di lapangan saat penelitian berlangsung untuk kemudian dianalisis menggunakan teori manajemen.

## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif ialah proses *scientific research* yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan manusia dalam lingkup sosial dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh serta dipaparkan pandangan rinci dari informan dan dilakukan dalam latar yang alamiah tanpa campur tangan peneliti (Creswell dalam Herdiansyah, 2012). Herdiansyah (2012) juga menjelaskan mengenai penelitian kualitatif, yakni *scientific research* yang dimaksudkan untuk mengetahui sebuah fenomena pada lingkup sosial dengan cara ilmiah melalui tahapan interaksi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang ditelusuri. Lebih lanjut, Sugiyono (2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan prinsip postpositivisme atau biasa disebut sebagai interpretive sebab data penelitian didapatkan dari lapangan.

Prastowo (2011) mengartikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai *research* yang menggambarkan suatu kondisi obyek yang sedang diteliti. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menganalisis manajemen pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang.

### 1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ialah lokasi di mana masalah penelitian terjadi dan peneliti mendapatkan informasi dari objek yang diteliti. Situs bisa merupakan wilayah tertentu maupun lembaga tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Sesuai dengan latar belakang yang telah digambarkan, lantas ditetapkan lokus penelitian, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

### 1.9.3. Subjek Penelitian

Moleong (2007) menjelaskan bahwa adanya informan bertujuan agar peneliti dapat mendapatkan banyak informasi dengan waktu wawancara yang singkat sebab informan memberikan manfaat dalam bertukar pikiran, berbicara, serta membandingkan suatu kejadian yang didapatkan dari subjek lainnya. Spradley (dalam Sugiyono, 2012) memaknai bahwa dalam penelitian kualitatif istilah yang digunakan bukan populasi layaknya penelitian kuantitatif, melainkan memanfaatkan istilah “*social situation*” atau situasi sosial yang dikategorikan menjadi tiga komponen, meliputi: lokasi, aktor, dan aktivitas. Penelitian ini menentukan subjek atau narasumber melalui metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* menurut Sugiyono (2012) merupakan teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah sedikit lambat laun membesar seperti analogi dari bola salju yang terus menggelinding. Informan kunci (*key*

*informant*) yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pihak Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan DP3A Kota Semarang, untuk memperoleh keterkaitan hubungan dan menentukan informan selanjutnya sesuai dengan kriteria dan jenis informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang kualitatif diaplikasikan pada penelitian ini yang berbentuk kata-kata atau tindakan yang didapatkan langsung pada saat melakukan wawancara dan observasi lapangan sebagai wujud hasil wawancara dengan informan maupun narasumber. Selain itu, peneliti juga melengkapi dengan data lain sebagai berikut, yaitu:

##### a. Data Tertulis

Data tertulis merupakan data berwujud uraian atau penjelasan tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi, dokumen pribadi dan sumber buku. Dokumen resmi penulis dapatkan dari DP3A selaku instansi terkait.

##### b. Data Gambar

Data gambar merupakan data berbentuk simbol, peta, gambar, diagram, dan sebagainya. Melalui data gambar ini peneliti dapat mendapatkan data deskriptif yang berharga dan kerap kali digunakan sebagai bahan telaah dari sisi-sisi subjektif yang kemudian dianalisis secara induktif (Moleong, 2007).

c. Data Statistik

Penggunaan data statistik pada penelitian kualitatif dapat menjadi sumber data tambahan. Data statistik bisa memberi gambaran subjek pada latar penelitian.

Penelitian ini menggabungkan tiga jenis data di atas. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang relevan serta memberikan kemudahan bagi peneliti pada saat melakukan penelitian.

1.9.5. Sumber data

Sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan kegiatan, selebihnya dapat disinggung sebagai informasi pendukung seperti sumber informasi tertulis, foto, statistik, dan laporan dari hasil rekaman suara (Lofland dalam Moleong 2007). Sumber data pada penelitian ini penulis dapatkan dari:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objek penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini ialah wawancara langsung dengan informan serta observasi secara langsung ke objek penelitian. Data ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh peneliti kepada pihak DP3A yang terlibat langsung dalam manajemen

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang sifatnya sebagai pendukung pembahasan. Data proses mendapatkan data ini, peneliti tidak langsung memperolehnya dari subjek penelitian melainkan diperoleh dari pihak ketiga maupun pihak lain. Data sekunder yang penulis gunakan berupa peraturan-peraturan pemerintah, laporan-laporan, studi kepustakaan, dokumentasi, buku, artikel, jurnal, serta berbagai sumber yang masih berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, penulis melakukan triangulasi data melalui penggabungan hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Berikut merupakan teknik mengumpulkan data yang digunakan penulis:

a. Wawancara

Wawancara ialah komunikasi antara dua pihak yang dilakukan dengan tujuan bertukar pikiran dan ide melalui tanya jawab untuk membentuk suatu makna tentang pokok bahasan tertentu. Perlu penggunaan teknik wawancara agar dapat menggali sedalam mungkin informasi terkait manajemen pencegahan



kekerasan yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara semi terorganisir di mana wawancara dijalankan dengan pertanyaan yang telah disusun untuk kemudian satu persatu didalami satu persatu guna mendapatkan data tambahan.

b. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan melihat langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang sejalan dengan objek yang sedang didalami. Pada penelitian ini peneliti akan secara langsung melihat manajemen pencegahan terhadap perempuan dan anak di DP3A Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi kualitatif dengan melakukan survei atau menelaah laporan yang disajikan oleh subjek atau oleh orang lain mengenai subjek. Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berwujud foto saat melakukan penelitian, rekaman saat melakukan wawancara, jurnal, arsip, artikel maupun berita yang berkaitan dengan topik penelitian serta data-data resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak DP3A Kota Semarang.

#### 1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif merujuk pada pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yang memaparkan bahwa analisis data dirumuskan menjadi tiga bagian. yakni reduksi data, pemaparan data, serta penarikan kesimpulan.

##### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyortir dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan urgensi penelitian saja. Data yang didapatkan pada saat pengumpulan data tentunya banyak dan beragam sehingga dengan dilakukan reduksi data maka dapat dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait manajemen pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang.

##### b. Pemaparan data

Pemaparan data merupakan pengenalan informasi dalam wujud paragraf, grafik, hubungan sebab akibat antar golongan, diagram alur, dan semacamnya. Pemaparan data membantu peneliti dalam menelaah apa yang terjadi sehingga bisa merumuskan tindakan lanjutan berdasar pada yang telah dipahami tersebut.

##### c. Penarikan kesimpulan

Kategorisasi yang sudah terbentuk dalam penyajian data memberikan keterkaitan sebab akibat antar data yang didukung dengan teori-teori yang sejalan, peneliti kemudian mendapatkan gambaran utuh mengenai fenomena yang diteliti untuk kemudian disimpulkan mengenai manajemen serta faktor terkait manajemen pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak oleh DP3A Kota Semarang.

Analisis data juga peneliti lakukan dengan memanfaatkan *software* ATLAS.ti yang dapat membantu membaca berbagai macam jenis data kualitatif. ATLAS.ti membantu peneliti untuk mengorganisasikan, memberi kode, dan menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur. Pada penelitian ini ATLAS.ti membantu peneliti untuk menganalisis data dengan cara pengkodean, penyajian data, serta memberi kesimpulan. *Software* ATLAS.ti memberi gambaran jaringan yang mampu menelusuri hubungan dari hasil penelitian untuk dianalisis.

#### 1.9.8. Kualitas Data

Peneliti melakukan triangulasi untuk memastikan bahwa data yang terkumpul tidak mengalami kesalahan. William Wiersma (dalam Sugiyono, 2020) memaknai triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga (3) cara triangulasi yang meliputi :

- a. Triangulasi sumber ialah proses pengujian validitas yang dilakukan dengan verifikasi data yang didapatkan dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik ialah pengujian keandalan yang dilakukan dengan benar-benar melihat informasi dari sumber yang sama tetapi menggunakan berbagai metode. Pengecekan dapat dilakukan dengan wawancara untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan pustaka, dokumentasi, dan observasi.
- c. Triangulasi waktu ialah pengujian data yang dilakukan pada sumber yang sama di tempo yang berbeda.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik guna menguji kualitas data yang diperoleh. Informasi nantinya tidak hanya diperoleh dari seorang informan sama namun juga melibatkan informan lain agar bisa mendapatkan informasi yang sejalan dengan fakta di lapangan. Peneliti juga melakukan triangulasi teknik dalam validasi data dengan cara menelaah kesesuaian hasil wawancara dengan hasil observasi di lapangan, dokumentasi, serta studi kepustakaan.